

## Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Kota Cerdas

**Authors:**

Ika Sartika<sup>1</sup>

**e-Mail:**

ika\_sartika@ipdn.ac.id

**Affiliation:**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia<sup>1</sup>

\*Corresponding author

Ika Sartika

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

ika\_sartika@ipdn.ac.id

Received: June 08, 2023

Revised: June 19, 2023

Accepted: June 28, 2023

Available Online: June 30, 2023

### Abstrak

Kota Banjarmasin termasuk ke dalam program 100 *Smart City* yang diluncurkan oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi. Mengingat kondisi geografis yang khas dengan banyaknya sungai, maka konsep pengembangan kota cerdas di Banjarmasin bisa berbeda dengan kota lainnya. Tentu saja pemerintah Kota Banjarmasin harus benar-benar siap mewujudkan kota cerdas sesuai dengan kondisi geografis dan dapat meningkatkan pelayanan publik. Banjarmasin *Smart City* yang baru diluncurkan masih memerlukan pembenahan, terkait integrasi aplikasi serta tingkat utilitas dan efektivitas yang masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin menuju kota cerdas, yang diikuti dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempercepat terbentuknya kota cerdas di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dengan visualisasi diagram radar. Sedangkan analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak NVIVO 12 PLUS untuk memetakan hasil wawancara dengan informan, untuk selanjutnya dilakukan proses *coding* dari hasil wawancara kepada setiap *nodes* yang dibuat berdasarkan dimensi-dimensi kota cerdas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin menuju kota cerdas berada dalam kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama). Faktor-faktor yang dapat mempercepat terwujudnya Banjarmasin Kota Cerdas adalah: pusat data yang terintegrasi, iklim usaha yang kondusif, kesehatan, perencanaan kota yang ramah lingkungan, penerapan *reward and punishment* yang adil dan konsisten, masyarakat yang kritis dan berbudaya, moda transportasi campuran, serta infrastruktur fisik dan internet yang memadai. Sementara itu dimensi masyarakat cerdas mempunyai kontribusi paling besar untuk mewujudkan Banjarmasin Kota Cerdas.

Kata-Kata Kunci: kesiapan pemerintah, masyarakat cerdas, NVIVO 12 PLUS

### Abstract

*The city of Banjarmasin is included in the 100 Smart City program launched by the Ministry of Information and Communication. Considering the unique geographical conditions with many rivers, the concept of developing a smart city in Banjarmasin can be different from other cities. Of course, the Banjarmasin City government must be truly ready to create a smart city in accordance with geographical conditions and can improve public services. The newly launched Banjarmasin Smart City still requires improvements, regarding application integration and the level of utility and effectiveness which is still relatively low. This research aims to analyze the readiness of the Banjarmasin City Government towards a smart city, followed by identifying factors that can accelerate the formation of a smart city in the City of Banjarmasin. The method used is descriptive quantitative and qualitative. Quantitative data analysis uses descriptive statistics with radar*

diagram visualization. Meanwhile, qualitative data analysis uses NVIVO 12 PLUS software to map the results of interviews with informants, then a coding process is carried out from the interview results for each node which is created based on the dimensions of the smart city. The research results concluded that the readiness of the Banjarmasin City Government towards a smart city is in the category of ready (medium) to ready and able to compete (major). Factors that can accelerate the realization of Smart City Banjarmasin are integrated data centers, conducive business climate, health, environmentally friendly city planning, fair and consistent application of reward and punishment, critical and cultured society, mixed modes of transportation, and adequate physical and internet infrastructure. Meanwhile, the smart society dimension has the greatest contribution to realizing the Smart City of Banjarmasin.

*Keywords: government readiness, intelligent society, NVIVO 12 PLUS*

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi informasi dan komunikasi membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, akuntabel, mudah, murah dan tepat waktu. Kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance* (Amri, 2016).

Seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk, tingkat kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi. Hal ini didukung oleh semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan di berbagai sektor. Penggunaan TIK tidak hanya di pemerintahan, tetapi sudah bergeser dalam pelayanan publik yang lebih luas, yaitu masyarakat kota. *Smart City* sebagai sebuah jalan keluar bagi banyaknya problematika yang harus diselesaikan pemerintah daerah terkait dengan semakin kompleksnya permasalahan di kota-kota besar (Damanik & Purwaningsih, 2018). Kota memiliki permasalahan yang terus bertambah dalam penataan ruangnya seiring waktu berjalan (Suhendra & Ginting, 2018). Oleh sebab itu, konsep *Smart City* mulai diterapkan di kota-kota besar di seluruh dunia.

Konsep *Smart City* berdasarkan *United Nation* bertujuan untuk membentuk kota yang *sustainable* (ekonomi, sosial, lingkungan), membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. *Smart City* menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kota yang lebih efisien (Tampubolon, 2016). *Smart City* dapat didefinisikan menjadi 6 (enam) dimensi (Amri, 2016), yaitu:

- (1) *Smart Government* (Pemerintahan Cerdas),
- (2) *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas),
- (3) *Smart Live* (Kehidupan Cerdas),

- (4) *Smart Living* (Lingkungan Cerdas),
- (5) *Smart People* (Orang/Masyarakat Cerdas), dan
- (6) *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas).

Kota cerdas merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi *Internet of things (IoT)* dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Kota-kota di negara-negara maju dunia telah menerapkan *Smart City* dengan teknologi yang sangat canggih. Lima besar kota terbaik dunia yang menerapkan *Smart City* adalah Vienna, Toronto, Paris, New York, dan London. Bagaimanakah dengan Indonesia? Pada 22-23 Mei 2017, dilakukan *kick-off* program Gerakan Menuju 100 *Smart City*, di Makassar. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan *MoU (Memorandum of Understanding)* antara perwakilan Pemerintah Pusat dengan 25 kepala daerah yang terpilih sebagai peserta tahap pertama. Daftar kota peserta tahap pertama tersebut adalah Kota Semarang, Kota Singkawang, Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Tomohon, Kota Jambi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Samarinda, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk kabupaten, pesertanya adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Badung, Kabupaten Siak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Banyuwangi.

Sebuah kota bisa disebut sebagai kota cerdas atau *smart city* jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga (*Apa Itu Smart City Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia*, n.d.). Implementasi *smart city* di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.

Meski ada banyak pihak yang berusaha mewujudkan *smart city*, bukan berarti tak ada tantangan untuk mewujudkan konsep tersebut di Indonesia. Salah satu tantangan tersebut adalah harga perangkat yang tinggi dan terbilang sulit diperoleh. Selain itu, belum semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang pemanfaatan *IoT (Internet of Things)*. Pemerintah daerah setempat perlu menyediakan infrastruktur teknologi informasi sebagai langkah awal mewujudkan *smart city*. Setelah infrastruktur memadai, setiap daerah bisa membuat semacam *data center* atau *command center*. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah mempersiapkan masyarakat untuk menerima perubahan ke arah digitalisasi.

Permasalahan yang sama juga terjadi di Kota Banjarmasin yang sudah dicanangkan sebagai kota cerdas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini pun pada tanggal 17 Februari 2018 telah meluncurkan *Smart City Command Center* Banjarmasin yang berpusat di Balai Kota, Jalan RE Martadinata Banjarmasin (*17 Februari, Program Smart City Banjarmasin Beroperasi*, n.d.). Untuk

program *Smart City* Banjarmasin, selama ini masih parsial atau terpisah-pisah, sehingga tidak terpusat. Sebetulnya, pelayanan berbasis *online* yang menjadi bagian dari program *smart city* di Banjarmasin sudah berjalan. Contohnya, dari perizinan *online*, kecamatan *online* dengan Disdukcapil, pariwisata *online*, lapor di Humas Pemkot Banjarmasin yang akan ditambah dengan bahasa Banjar Pepadah. Bahkan, Balai Kota juga telah memasang empat unit CCTV di Taman Kamboja, Patung Bekantan, Tugu 0 Kilometer tinggal dikoneksikan. Rencananya pemerintah kota akan menambah pemasangan CCTV di tempat umum sebagai langkah awal. Bahkan, pihak Polda Kalsel juga akan memberi transfer informasi kawasan rawan macet di *Command Center Banjarmasin*, sehingga bisa diketahui dengan mudah kawasan yang macet lalu lintasnya.

Seluruh kelurahan, kecamatan, dan SKPD lainnya di Banjarmasin juga sudah terpantau. Selain itu pemerintah kota juga meluncurkan aplikasi pelayanan ayokebanjarmasin. Aplikasi tersebut terkoneksi dengan go klotok, e-lapor, serta berbelanja *online* di Banjarmasin\_mall. Beberapa program juga ikut diluncurkan, mulai dari e-pembayaran, e-perizinan, hingga e-tandatangan (*Smart City Banjarmasin Resmi Diluncurkan, Begini Penampakkannya*, n.d.). Banjarmasin *Smart City* mempersembahkan *smart security* yang menampilkan 24 jam CCTV dan *free wifi* di objek wisata Patung Bekantan, Taman Siring Nol Kilometer, Menara Pandang dan Taman Kamboja Banjarmasin. Saat ini, baru 11 aplikasi yang terintegrasi di *command centre* atau pusat komando program *smart city* milik Pemkot Banjarmasin (*Launching Banjarmasin Smart City, 11 Aplikasi Terintegrasi Di Command Centre*, n.d.).

Inovasi lainnya adalah berupa Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Terpadu (Simpul) Kota Banjarmasin, program elektronik kelurahan yang diberi nama Pelayanan Administrasi Kelurahan Terintegrasi (Si Palui). Selain itu ada program Lintang Lantung (Ulun Datang Langsung Tuntung) yang merupakan kemudahan membuat layanan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin. Selanjutnya itu ada pula data seluruh menara di Banjarmasin, serta aplikasi e-Lapor yang merupakan program menerima keluhan masyarakat melalui *online* yang dikelola bagian humas pemerintah kota. Adapula aplikasi Banjarmasin-Mall.com untuk akses belanja *online* atau daring khas Banjarmasin dan e-Energi, yakni, memanfaatkan daur ulang sampah menjadi gas metane. Semuanya terintegrasi dan bisa diakses secara umum di website Banjarmasin.go.id (*Launching Banjarmasin Smart City, 11 Aplikasi Terintegrasi Di Command Centre*, n.d.). Aplikasi yang dirancang dapat menjamin pemantauan layanan di 52 kelurahan pada lima kecamatan, termasuk kondisi layanan di PDAM dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin melalui pusat komando.

Kota Banjarmasin yang berada di atas aliran ratusan sungai memiliki tantangan terbesar dalam menerapkan *smart city* terutama menyiapkan mental masyarakat (*Kesulitan Kota Banjarmasin Mewujudkan Smart City*, n.d.). Pemerintah Kota Banjarmasin mesti fokus dan memilih apakah memusatkan *smart city* berbasis sungai atau daratan. Jika memilih fokus membangun *smart city* berbasis sungai, maka ada konsekuensi semua fasilitas harus bagus seperti halnya kualitas air dan transportasi air, sementara kondisi

saat ini airnya berwarna kuning. Harapan Pemerintah Kota Banjarmasin ke depan dapat terwujud empat aspek untuk mewujudkan *smart city*, yaitu: ekonomi cerdas (*smart economy*), mobilitas cerdas (*smart mobility*), pemerintah cerdas (*smart governance*), dan masyarakat cerdas (*smart people*). Saat ini Kota Banjarmasin baru berhasil mewujudkan *smart governance* walaupun belum sepenuhnya terintegrasi. Kesulitan terbesar juga adalah mengubah *mindset* masyarakat yang membutuhkan waktu cukup lama, artinya tidak cukup hanya dalam waktu singkat. Selain itu, kendala lain membangun *smart city* di Kota Banjarmasin adalah anggaran atau dana. Selama ini dana diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Untuk mewujudkan *smart city* yang ideal, anggaran yang ada sebetulnya belum memadai. Selain itu pelayanan transportasi publik masih belum optimal di Kota Banjarmasin. *Smart City* tidak bisa apabila hanya satu aspek, tetapi harus semua aspek.

Kota Banjarmasin mempunyai keunikan terkait kondisi geografisnya yaitu berupa aliran sungai. Konsep *smart city* yang akan diimplementasikan ke depan pastinya akan berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Di samping itu, Banjarmasin *Smart City* yang baru diluncurkan masih memerlukan pembenahan, terkait integrasi aplikasi serta tingkat utilitas dan efektivitas yang masih relatif rendah. Melihat Kota Banjarmasin yang baru mencanangkan sebagai kota cerdas dengan aplikasi yang relatif masih terbatas, maka penelitian akan difokuskan pada kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin menuju kota cerdas. Analisis kesiapan akan difokuskan pada aspek sosio teknis seperti hasil kajian tentang model ideal untuk melihat kesiapan implementasi *e government* di Gorontalo (Firto Nento, Lukito Edi Nugroho, 2017). Dengan demikian, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin menuju kota cerdas serta faktor-faktor penentu apa saja yang dapat mempercepat terbentuknya kota cerdas di Kota Banjarmasin?

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis yang berbeda, maka akan diperoleh deskripsi penelitian yang lebih lengkap dan rinci. Lingkup operasional penelitian ini difokuskan pada enam aspek dalam kota cerdas, kemudian dirinci ke dalam dimensi-dimensi sesuai masing-masing aspek, yaitu:

Tabel 1 Lingkup Operasional Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator
Smart City (Kota Cerdas)	<i>Smart Government</i> (Pemerintahan Cerdas)	a. <i>Enabling supply &amp; demand side policy</i> b. <i>Transparency &amp; open data</i> c. <i>ICT &amp; e-gov</i>
	<i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)	a. <i>Enterpreneurship &amp; innovation</i> b. <i>Productivity</i> c. <i>Local &amp; global interconnectedness</i>
	<i>Smart Living</i> (Kehidupan Cerdas)	a. <i>Culturally vibrant &amp; happily</i> b. <i>Safe</i> c. <i>Healthy</i>

	<i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Green buildings</i></li> <li>b. <i>Green energy</i></li> <li>c. <i>Green urban planning</i></li> </ul>
	<i>Smart People</i> (Masyarakat Cerdas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>21<sup>st</sup> Century education</i></li> <li>b. <i>Inclusive society</i></li> <li>c. <i>Embrace activity</i></li> </ul>
	<i>Smart Mobility</i> (Mobilitas Cerdas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Mixed-modal access</i></li> <li>b. <i>Prioritized clean and non-motorized options</i></li> <li>c. <i>Integrated ICT</i></li> </ul>

Sumber: (Mujiyono et al., 2016) dan (Perencanaan et al., 2015)

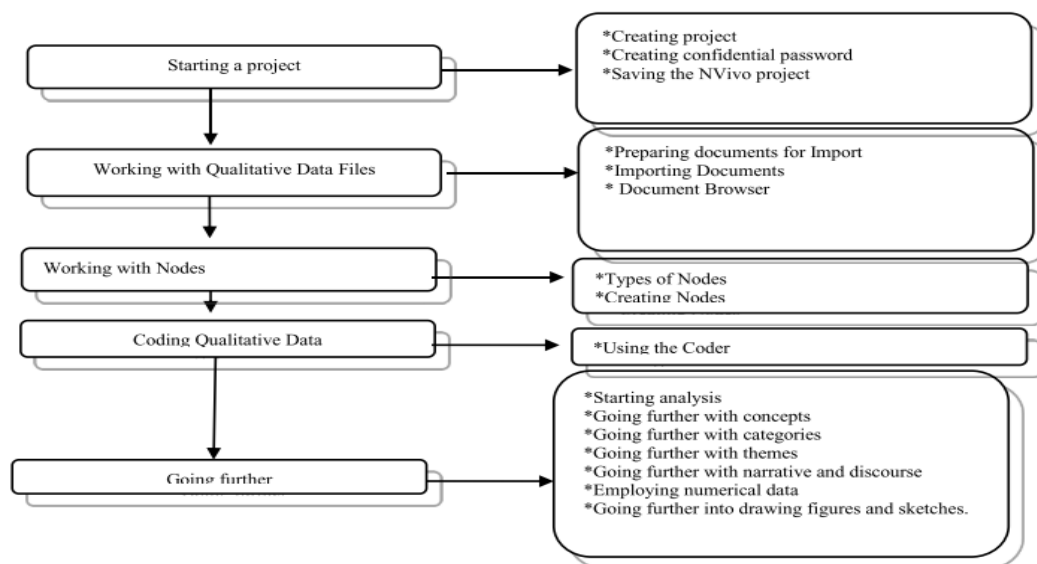
Dalam penelitian ini yang menjadi responden dan informan ditentukan berdasarkan *Model Penta-Helix* (Muhyi et al., 2017), yang meliputi lima jenis pemangku kepentingan: dunia usaha, pemerintahan kota, masyarakat, perguruan tinggi, dan media. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk semua informan. Responden yang dilibatkan adalah PNS dan non-PNS yang ditentukan secara *purposive* dengan kriteria sebagai pengguna internet yang aktif (Damanik & Purwaningsih, 2018). Responden yang berhasil mengisi google form adalah sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Survey dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun untuk melihat kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin menuju kota cerdas. Kuesioner dibuat dalam format google form dan dikirim secara online kepada responden, wawancara yang dilakukan terhadap informan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin menuju kota cerdas, dokumentasi, serta observasi

Data kuantitatif dianalisis berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan statistika deskriptif, seperti: rata-rata, simpangan baku, serta indeks kesiapan. Berdasarkan hasil perbandingan dengan kriteria tertentu, maka model *e-readiness ICT Pura* merupakan model yang digunakan untuk mengukur kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin menuju kota cerdas. *ICT Pura* berarti "Kota TIK" atau dalam bahasa asingnya sering diistilahkan sebagai "*Digital City*" – sebuah kota yang berhasil mengelola TIK dengan baik sehingga memberikan kontribusi manfaat yang signifikan terhadap pengembangan masyarakatnya (Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika No. 248/PER/DJPPI/KOMINFO/10/2011 Tentang Profil Dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura, 2011). Untuk melihat nilai indeks kesiapan, penelitian ini juga akan mengadopsi kategori yang digunakan dalam *ICT Pura* dengan sedikit modifikasi, yaitu menghilangkan angka 0. Nilai Indeks Kesiapan akan berkisar antara 1 (terendah) hingga 5 (tertinggi) (Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika No. 248/PER/DJPPI/KOMINFO/10/2011 Tentang Profil Dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura, 2011). Adapun arti dari indeks tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 = Kota/Kabupaten masih jauh dari siap (I-pratama)
- 2 = Kota/Kabupaten sudah hampir siap (I-muda)
- 3 = Kota/Kabupaten telah siap (I-madya)
- 4 = Kota/Kabupaten telah siap, dan mampu bersaing (I-utama)

5 = Kota/Kabupaten telah siap, dan terdepan dalam persaingan (I-paripurna)

Sedangkan data kualitatif dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak NVIVO. NVIVO adalah paket perangkat lunak yang diproduksi oleh *QSR International*, memiliki banyak keunggulan dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas penelitian. Analisis data kualitatif menjadi lebih mudah dan menghasilkan hasil yang lebih profesional. Perangkat lunak ini dapat mengurangi sejumlah besar tugas manual dan memberi peneliti lebih banyak waktu untuk menemukan kecenderungan, mengenali tema, dan menarik kesimpulan (Hilal & Alabri, 2013). Prosedur analisis data dengan menggunakan perangkat lunak NVIVO adalah sebagai berikut.:



Gambar 1 Prosedur Pemakaian Perangkat Lunak NVIVO (Hilal & Alabri, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

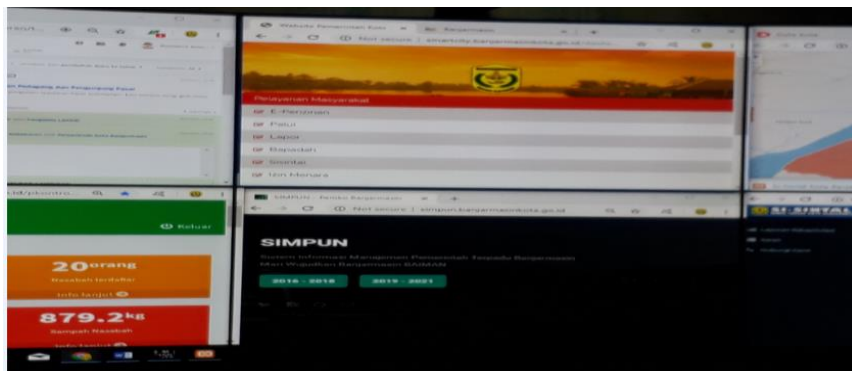
### A. Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Kota Cerdas

#### 1. Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Pemerintahan Cerdas

Pemerintahan Cerdas diukur melalui tiga sub dimensi, yaitu kebijakan kota cerdas, keterbukaan informasi dan tersedianya pusat data yang terintegrasi, serta pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Nilai yang diperoleh untuk kebijakan kota cerdas adalah 79,2%, termasuk kategori siap, walau untuk mencapai kondisi ideal masih dibutuhkan perbaikan yang berkesinambungan. Indikator yang dirasakan masih kurang berdasarkan persepsi responden dari kebijakan kota cerdas adalah peta jalan untuk mewujudkan kota cerdas. Peta jalan ini sebaiknya dimunculkan di *website* Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Kota Banjarmasin yang mudah diakses oleh semua pihak secara *online* dan dapat diunduh sebagai acuan untuk mewujudkan pemerintahan cerdas. *Roadmap* (peta jalan) tentang kebijakan kota cerdas seharusnya muncul dalam menu Informasi Publik yang ini.

Kenyataannya menu itu belum ada, bahkan menu yang sudah ada saja tidak dapat dibuka isinya, ketika diklik tidak muncul informasi apa pun. Hal ini memberi kesan bahwa *roadmap* tentang kota cerdas belum ada.

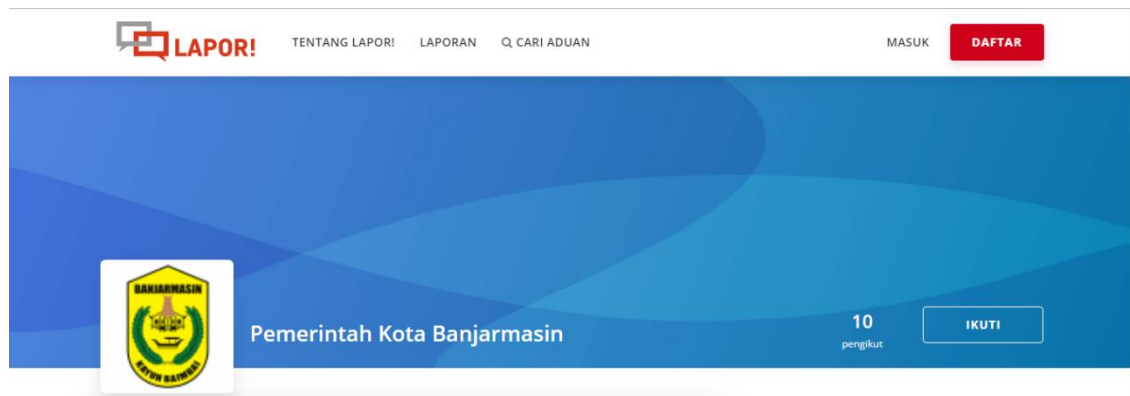
Persepsi responden tentang Keterbukaan Informasi dan Tersedianya Pusat Data yang Terintegrasi hampir sama untuk semua indikator, artinya tidak ada indikator yang lebih baik atau lemah, dengan nilai 76,5, sedikit lebih rendah dibanding dengan kebijakan kota cerdas. Keduanya sama-sama dikategorikan siap, walau untuk mencapai kondisi ideal atau sangat siap masih dibutuhkan perbaikan dan komitmen dari semua pihak. Persepsi responden tentang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi juga hampir sama untuk semua indikator, artinya tidak ada indikator yang lebih baik atau lemah, dengan nilai 74,7, merupakan nilai terendah untuk dimensi pemerintahan cerdas. Artinya, ada hal-hal yang masih dirasakan kurang terkait dengan pelayanan masyarakat. Gambar 2 memperlihatkan contoh pelayanan masyarakat yang dapat diakses melalui Banjarmasin *Command Center*. Dari gambar yang ada terlihat bahwa partisipasi masyarakat baru mencapai 20%.



Gambar 2 Contoh Pelayanan Masyarakat yang Terintegrasi

Menu yang langsung berinteraksi dengan masyarakat adalah e-lapor. Melalui e-lapor, masyarakat dapat melaporkan berbagai keluhan, kejanggalan, atau pun keresahan mereka kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Menu e-lapor dapat dilihat pada Gambar 2. Terlihat bahwa pemanfaatan e-lapor masih rendah, pengikut hanya 10 orang, dan masyarakat yang akses dan membuat laporan juga masih terbatas. Perlu sosialisasi yang lebih intensif lagi. Menu lainnya terkait dengan informasi menara BTS di Kota Banjarmasin, layanan wifi yang bisa diakses oleh masyarakat luas, serta email yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis. Perlu dikaji lebih jauh terkait efektivitas masing-masing layanan ini supaya perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka menjadi kota cerdas.





Gambar 3 Menu e-lapor Kota Banjarmasin (*Portal Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Pemerintah Kota Banjarmasin, 2019*)

Dari ketiga sub dimensi tersebut di atas, selanjutnya dapat diukur kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Kota Cerdas. Nilai yang diperoleh adalah 76,8, sudah termasuk siap walau belum termasuk ideal (sangat siap). Perlu pengembangan lebih lanjut, terutama terkait peta jalan kota cerdas, serta layanan kepada masyarakat. Nilai dalam skala 5 adalah 3,84, yaitu antara 3 dan 4, termasuk kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama).

## 2. Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Ekonomi Cerdas

Ekonomi Cerdas diukur melalui tiga sub dimensi, yaitu Kewirausahaan dan Inovasi, Produktivitas, serta Keterhubungan Lokal dan Global. Nilai yang diperoleh sub dimensi Kewirausahaan dan Inovasi adalah 76,23 dan termasuk kategori siap, walau masih perlu peningkatan untuk menuju kondisi ideal. Persepsi responden untuk setiap indikator hampir sama, tidak ada indikator yang lebih baik atau lebih lemah. Nilai yang diperoleh untuk sub dimensi Produktivitas adalah 73,37, dan termasuk kategori siap, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sub dimensi kewirausahaan dan inovasi. Artinya, produktivitas masih dianggap memerlukan dorongan dari pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin semakin meningkat. Persepsi responden untuk setiap indikator juga tidak terlalu berbeda, artinya hampir sama untuk semua indikator, tidak ada yang dianggap lebih baik atau lebih buruk.

Nilai yang diperoleh untuk sub dimensi Keterhubungan Lokal dan Global adalah 72,57, merupakan nilai terendah untuk ketiga sub dimensi dalam ekonomi cerdas. Walau pun ketiga sub dimensi ini masih termasuk dalam kategori siap. Indikator yang paling lemah adalah keterhubungan dengan dunia internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi usaha di Kota Banjarmasin masih berskala lokal, masih kurang yang berorientasi global. Dengan adanya pemerintahan cerdas, seharusnya ekonomi cerdas pun akan dapat terwujud. Selanjutnya, dari ketiga sub dimensi tersebut dapat diukur kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Ekonomi Cerdas dengan nilai yang diperoleh adalah 72,97, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintahan Cerdas, walau

keduanya masih termasuk kategori siap. Nilai dalam skala 5 adalah 3,65, yaitu antara 3 dan 4 termasuk kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama).

### **3. Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Kehidupan Cerdas**

Kehidupan Cerdas diukur dengan tiga sub dimensi, yaitu: Semangat dan Bahagia yang Membudaya, Keamanan, dan Kesehatan. Nilai yang diperoleh sub dimensi Semangat dan Bahagia yang Membudaya cukup tinggi, yaitu: 80,57. Hal ini menunjukkan kehidupan di Kota Banjarmasin sudah sangat kondusif untuk mewujudkan kota cerdas. Masyarakat yang selalu semangat dan bahagia, bahkan sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat merupakan modal awal yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kota cerdas. Persepsi responden untuk setiap indikator hampir sama, tidak ada indikator yang dianggap lebih baik atau pun lebih buruk.

Nilai untuk sub dimensi Keamanan juga cukup tinggi, yaitu: 81,03, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sub dimensi pertama. Hal ini menunjukkan Kota Banjarmasin aman dari berbagai gangguan kriminalitas. Keamanan merupakan hal penting yang menjadi kriteria bagi pengusaha untuk investasi di sebuah tempat. Dengan keamanan yang tinggi, maka lingkungan cerdas akan semakin mudah untuk terwujud. Sementara itu, sub dimensi kesehatan mempunyai nilai yang paling rendah di antara sub dimensi kehidupan cerdas, yaitu: 76,11. Indikator yang dianggap lemah berdasarkan persepsi responden adalah peraturan di bidang kesehatan serta biaya yang masih belum terjangkau. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyiapkan berbagai payung hukum dalam bidang kesehatan, serta berusaha mengefisienkan biaya pengobatan. Sehingga kesehatan dapat dijangkau oleh semua pihak.

Dari ketiga sub dimensi tersebut, maka dapat diperoleh indeks kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mewujudkan Kehidupan Cerdas, yaitu sebesar: 79,24, masih termasuk kategori siap. Dalam skala 5 diperoleh nilai 3,96, antara 3 dan 4, termasuk kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama). Nilai rata-rata menjadi turun karena sub dimensi kesehatan yang masih memiliki beberapa kelemahan.

### **4. Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Lingkungan Cerdas**

Lingkungan Cerdas diukur dengan tiga sub dimensi, yaitu: Bangunan Ramah Lingkungan, Energi Ramah Lingkungan, dan Perencanaan Kota Ramah Lingkungan. Nilai yang diperoleh untuk sub dimensi bangunan ramah lingkungan tidak terlalu tinggi, yaitu: 70,51. Responden belum begitu familiar dengan konsep bangunan ramah lingkungan, karena menganggap polusi di Kota Banjarmasin belum terlalu mengganggu. Tetapi semakin banyak penduduk dan kendaraan yang digunakan akan semakin tinggi tingkat polusi di Kota Banjarmasin. Oleh sebab itu, konsep bangunan ramah lingkungan harus mulai diterapkan. Untuk lima indikator yang ditanyakan kepada responden, indikator yang memiliki nilai terendah adalah sanksi terhadap bangunan yang ramah lingkungan dan peningkatan jumlah dan kualitas bangunan ramah lingkungan. Kedua indikator yang

dinilai paling lemah ini menunjukkan bahwa persepsi responden tentang upaya nyata pemerintah kota terkait pengurangan polusi melalui teguran atau sanksi terhadap pelanggaran tentang bangunan yang tidak ramah lingkungan masih lemah.

Nilai yang diperoleh untuk mewujudkan energi ramah lingkungan tidak berbeda jauh dengan bangunan ramah lingkungan, yaitu sebesar 68,9, bahkan lebih rendah. Sama halnya dengan bangunan ramah lingkungan, untuk sub dimensi energi ramah lingkungan juga indikator yang dianggap paling lemah adalah sanksi terhadap energi yang tidak ramah lingkungan serta peningkatan jumlah dan kualitas energi ramah lingkungan. Perencanaan untuk kedua sub dimensi ini dapat dibuat jadi satu dan diimplementasikan secara bersamaan.

Bangunan dan energi ramah lingkungan sejatinya memang menjadi satu kesatuan dalam perencanaan kota ramah lingkungan (sub dimensi ketiga). Persepsi responden terhadap perencanaan kota ramah lingkungan juga tidak jauh berbeda dengan kedua sub dimensi sebelumnya. Nilai yang diperoleh adalah sebesar 69,7, indikator yang paling lemah juga sama yaitu terkait sanksi terhadap perencanaan kota yang tidak ramah lingkungan serta peningkatan jumlah dan kualitas perencanaan kota ramah lingkungan. Inti dari lingkungan cerdas adalah perencanaan yang berorientasi pada ramah lingkungan untuk berbagai hal.

Dari ketiga sub dimensi tersebut, maka dapat diperoleh indeks kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mewujudkan Lingkungan Cerdas, yaitu sebesar: 69,71, masih termasuk kategori siap. Dalam skala 5 diperoleh nilai 3,49, antara 3 dan 4, termasuk kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama).

## **5. Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Masyarakat Cerdas**

Masyarakat Cerdas diukur dengan tiga sub dimensi, yaitu: Pendidikan Abad 21, Masyarakat yang Terbuka, dan Kebersamaan. Pendidikan Abad 21 ditandai dengan globalisasi dan serba online. Pendidikan yang terhubung dengan dunia internasional dengan kestabilan jaringan dan *bandwith* merupakan harga mati untuk terwujudnya pendidikan abad 21. Di Kota Banjarmasin sudah mulai ada proses ke arah sana dengan adanya penerimaan siswa yang sudah serba *online*. Tetapi ini masih jauh dari persyaratan pendidikan abad 21, karena yang diharapkan adalah proses pendidikan secara terus menerus dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih. Bidang pendidikan yang berbasis teknologi informasi juga harus ditingkatkan. Dewasa ini di Kota Banjarmasin baru ada dua perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Islam Negeri Banjarmasin. Pendidikan berbasis teknologi informasi tidak hanya diterapkan di perguruan tinggi, tetapi bisa juga mulai level SMP dan SMA. Tentu saja perlu didampingi dengan peraturan yang jelas supaya pemanfaatan teknologi ini berdampak positif. Nilai untuk sub dimensi pendidikan abad 21 berdasarkan persepsi responden adalah sebesar 69,7, masih relatif rendah. Indikator yang dianggap paling lemah adalah keterhubungan dunia pendidikan dengan dunia internasional. Hal ini bisa dijadikan sebagai masukan dalam perancangan program pendidikan di Kota Banjarmasin.

Sedangkan untuk sub dimensi kedua, yaitu masyarakat yang terbuka, nilai yang diperoleh sudah lebih tinggi, yaitu: 77,49. Artinya, masyarakat Kota Banjarmasin sudah mulai terbuka terhadap budaya luar. Rasa percaya diri sebagai suku sendiri juga sudah semakin kuat. Ini merupakan modal dasar yang kuat untuk mewujudkan masyarakat cerdas. Masyarakat Kota Banjarmasin dapat menerima masuknya budaya luar tanpa menghilangkan kekhasan sendiri, sehingga dapat saling sinergi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nilai untuk setiap indikator dipersepsikan hampir sama oleh responden. Sub dimensi yang ketiga, yaitu: Kebersamaan, dipersepsikan hampir sama dengan sub indikator masyarakat yang terbuka dengan nilai sebesar 79,89. Artinya, masyarakat Kota Banjarmasin memiliki jiwa toleran yang tinggi terhadap sesama manusia. Budaya gotong royong dan tolong menolong juga masih tertanam kuat di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin. Hal ini juga merupakan modal dasar yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas. Semua indikator dipersepsikan hampir sama oleh responden, artinya tidak ada indikator yang lebih kuat atau pun lemah.

Dari ketiga sub dimensi tersebut, maka dapat diperoleh indeks kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mewujudkan Masyarakat Cerdas, yaitu sebesar: 75,7, masih termasuk kategori siap. Nilai agak turun karena dipengaruhi oleh kesiapan dalam pendidikan abad 21 yang mempunyai nilai terendah dari ketiga sub dimensi tersebut. Dalam skala 5 diperoleh nilai 3,79, antara 3 dan 4, termasuk kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama). Nilai rata-rata menjadi turun karena sub dimensi pendidikan abad 21 yang masih memiliki beberapa kelemahan. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Banjarmasin.

## **6. Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Mobilitas Cerdas**

Mobilitas Cerdas diukur dengan tiga sub dimensi, yaitu: Akses Moda Transportasi Campuran, Pilihan Kendaraan yang Ramah Lingkungan, Bersih, dan Prioritas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Terintegrasi. Moda transportasi campuran biasanya dikenal di kota-kota besar dengan variasi moda yang sangat banyak. Di Kota Banjarmasin moda transportasi campuran saat ini memang belum dikenal dengan baik. Tetapi perkembangan selanjutnya tidak menutup kemungkinan moda transportasi campuran akan semakin berkembang dan menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat Kota Banjarmasin, mengingat moda transportasi air yang sejak dulu menjadi pilihan dapat dioptimalkan kembali. Persepsi responden tentang akses moda transportasi campuran memperoleh nilai 72,34, dengan anggapan bahwa pemerintah kota sudah siap dengan moda transportasi campuran ke depannya. Indikator yang dinilai paling lemah adalah kemudahan pembayaran dalam moda campuran. Ini yang harus dipikirkan secara serius dalam rangka mewujudkan mobilitas cerdas di Kota Banjarmasin.

Penilaian responden terhadap Pilihan Moda Transportasi Ramah Lingkungan, Bersih, dan Prioritas, memperoleh nilai sebesar: 65,71, lebih rendah dibandingkan dengan sub dimensi pertama. Indikator yang paling lemah adalah ketersediaan tempat duduk prioritas bagi yang membutuhkan (orang tua, wanita hamil, bayi). Memang sat ini pilihan moda transportasi di Kota Banjarmasin masih rendah, masyarakat lebih menyukai

bepergian dengan kendaraan pribadi. Untuk masa yang akan datang, transportasi massal dengan berbagai pilihan harus sudah dipikirkan oleh pemerintah kota.

TIK yang Terintegrasi dianggap sub dimensi yang paling siap dalam mewujudkan mobilitas cerdas, dengan nilai 72,57. Semua indikator dipersepsikan sama, tidak ada indikator yang dianggap lebih baik atau lebih buruk. Sub dimensi ini merupakan tanggung jawab penyedia jasa transportasi, baik pemerintah mau pun pihak swasta. Mobilitas cerdas membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah kota dengan pihak swasta (*public-private partnership*).

Dari ketiga sub dimensi tersebut, maka dapat diperoleh indeks kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mewujudkan Mobilitas Cerdas, yaitu sebesar: 70,21, masih termasuk kategori siap. Dalam skala 5 diperoleh nilai 3,51, antara 3 dan 4, termasuk kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama). Nilai rata-rata menjadi turun karena sub dimensi Pilihan Moda Transportasi Ramah Lingkungan, Bersih, dan Prioritas yang masih memiliki beberapa kelemahan. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Banjarmasin.

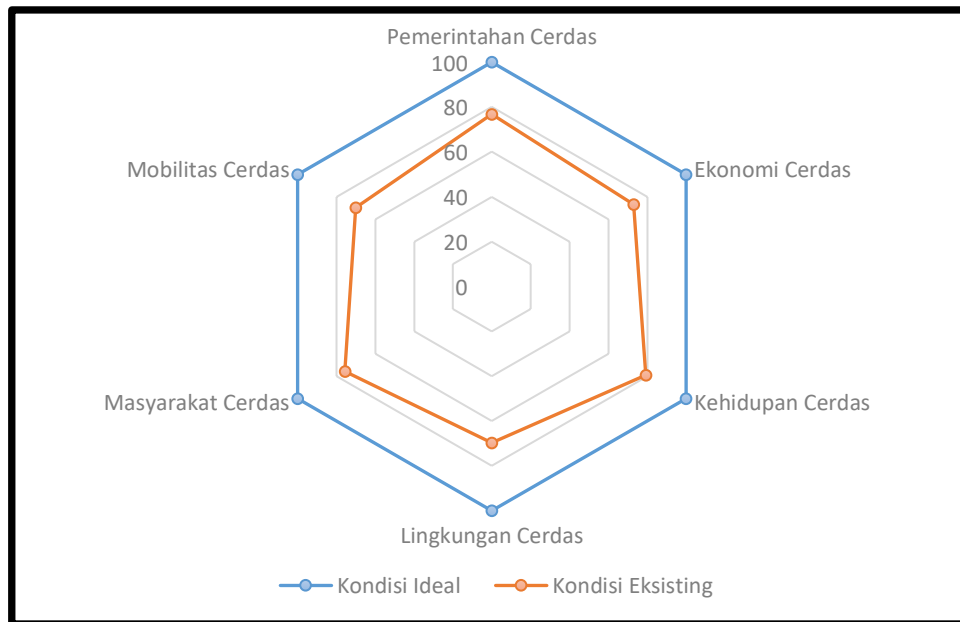
Berdasarkan keenam dimensi kota cerdas yang sudah digambarkan di atas, selanjutnya dapat dibuat rekapitulasi hasil penilain sebagai berikut.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Penilaian

<b>Dimensi Kota Cerdas</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skala 5</b>
Pemerintahan Cerdas	76,81	3,84
Ekonomi Cerdas	72,97	3,65
Kehidupan Cerdas	79,24	3,96
Lingkungan Cerdas	69,71	3,49
Masyarakat Cerdas	75,7	3,78
Mobilitas Cerdas	70,21	3,51

Sumber; Hasil Perhitungan

Dari Tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi Lingkungan Cerdas dan Mobilitas Cerdas merupakan dimensi yang paling lemah, walau keduanya masih berada dalam kategori siap. Dengan nilai dalam skala 5 antara 3 dan 4 maka Indeks Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Kota Cerdas dapat dikategorikan siap (madya) menuju siap yang mandiri (utama). Untuk mencapai kondisi ideal masih dibutuhkan berbagai upaya yang konsisten dan berkesinambungan. Gambar 3 memperlihatkan kondisi ideal dan kondisi eksisting untuk keenam dimensi kota cerdas. Dari gambar tersebut dapat dilihat karakteristik masing-masing dimensi sehingga dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka menuju kota cerdas.

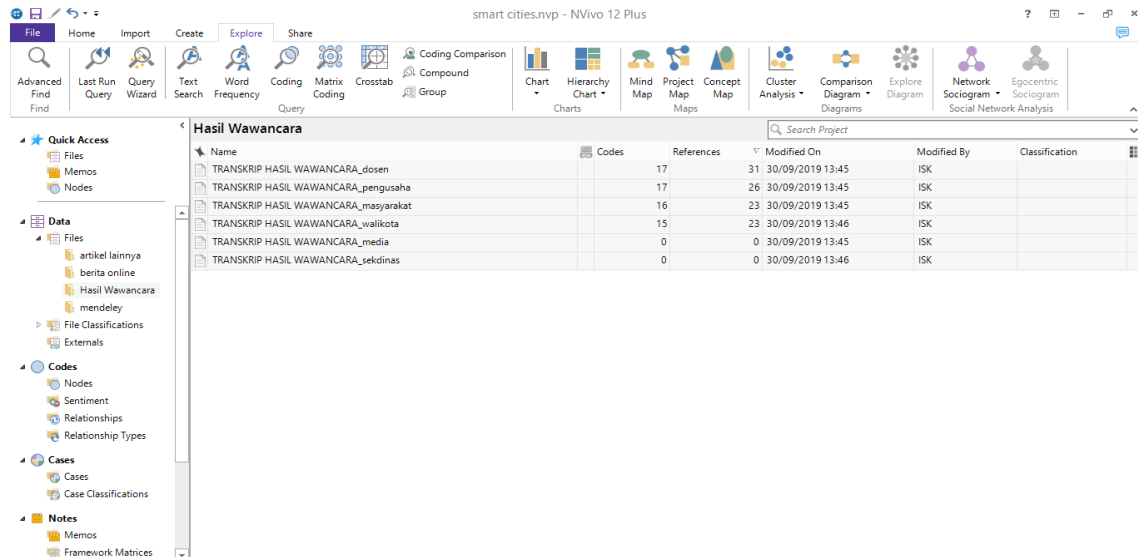


Gambar 4 Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Kota Cerdas

## B. Faktor-Faktor Penentu Yang Dapat Mempercepat Terbentuknya Banjarmasin Kota Cerdas

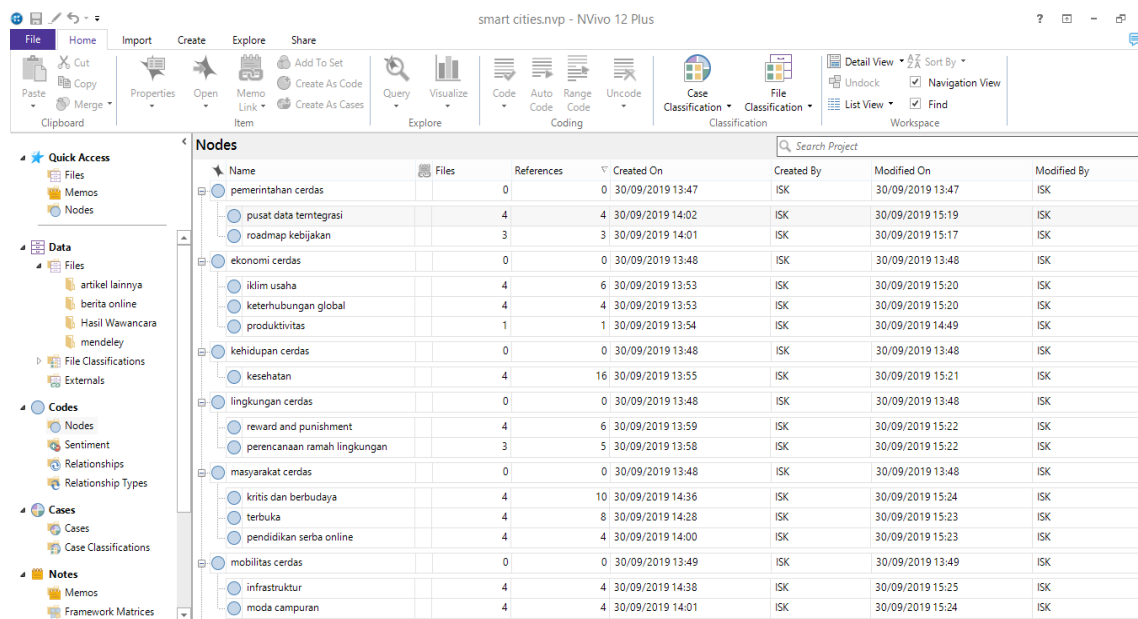
Terwujudnya sebuah kota menjadi kota cerdas sangat tergantung kesiapan semua pihak, tidak saja pemerintah. Oleh karena itu, faktor-faktor penentu yang dapat mempercepat terbentuknya kota cerdas di Kota Banjarmasin dapat diidentifikasi berdasarkan persepsi *stakeholders*. Seperti sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, *stakeholders* dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan prinsip *penta helix*, *Academician* (Akademisi), *Businessmen* (Pengusaha; Investor), *Community* (Masyarakat), *Government* (Pemerintah), dan Media.

Persepsi *stakeholders* dijaring melalui wawancara mendalam setelah melihat hasil dari analisis kuantitatif untuk mengukur kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mewujudkan kota cerdas. Pengolahan data selanjutnya menggunakan perangkat lunak NVIVO 12 PLUS untuk memetakan hasil wawancara supaya lebih bermakna dan bisa dikategorikan sesuai kebutuhan penelitian. Langkah pertama adalah mengimpor transkrip hasil wawancara dalam format *word* ke dalam program NVIVO (Gambar 5).

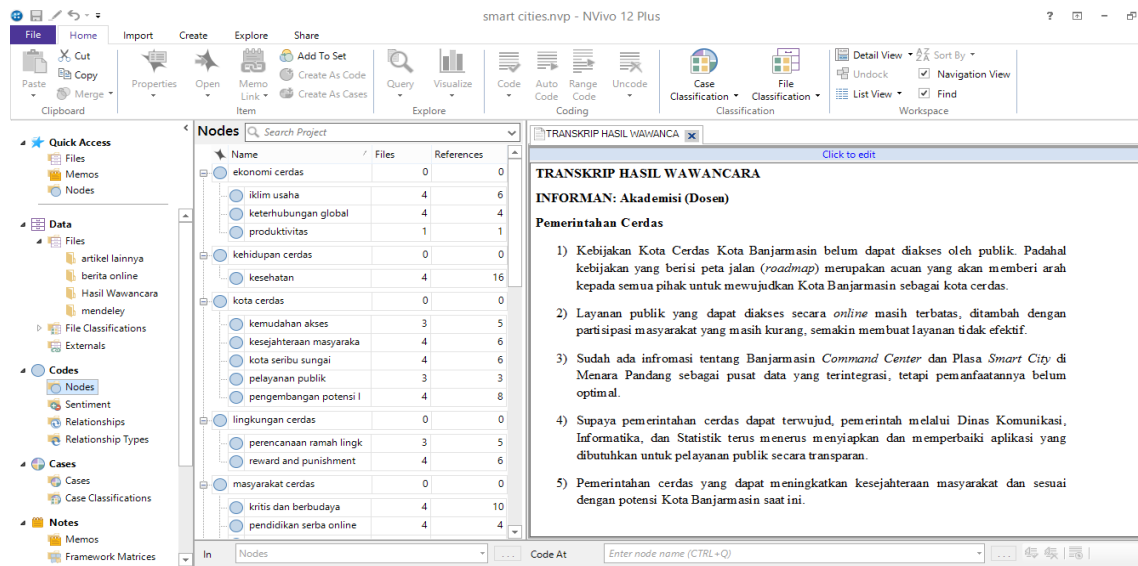


Gambar 5 Impor Data Hasil Wawancara Ke Dalam Program NVIVO 12 PLUS

Langkah selanjutnya adalah membuat *nodes* yang merupakan kata kunci dalam perwujudan kota cerdas di Banjarmasin. *Nodes* dapat ditentukan berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada rumusan masalah pertama, yaitu menentukan kesiapan pemerintah kota Banjarmasin dalam mewujudkan kota cerdas. *Nodes* juga dapat bertambah sesuai hasil wawancara, dan akan ditemukan ketika proses *coding*. Gambar 5 dan 6 memperlihatkan *nodes* yang berhasil dibuat serta proses *coding* untuk memetakan hasil wawancara.



Gambar 6 Nodes Perwujudan Kota Cerdas Banjarmasin



Gambar 7 Proses Coding

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa pemerintahan cerdas di Kota Banjarmasin dapat terwujud jika *roadmap* kebijakan serta pusat data yang terintegrasi segera disiapkan oleh pemerintah kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat data yang terintegrasi lebih banyak disarankan oleh informan sesuai dengan hasil wawancara. Ekonomi cerdas dapat segera terwujud jika iklim usaha yang kondusif, keterhubungan global, serta produktivitas menjadi perhatian semua pihak dalam implementasinya. Faktor pemicu terbesar menurut hasil wawancara adalah iklim usaha yang kondusif. Untuk kehidupan cerdas, hasil penelitian hanya merekomendasikan satu faktor, yaitu kesehatan. Segala sesuatu yang terkait kesehatan, seperti tarif, akses, serta peraturan pendukung supaya masyarakat merasa nyaman dan tidak dirugikan. Lingkungan cerdas akan segera terwujud jika perencanaan kota sudah menyertakan konsep ramah lingkungan dalam berbagai aspek, terutama terkait dengan bangunan dan energi ramah lingkungan. Di masa depan penggunaan sumber daya ramah lingkungan sudah tidak bisa ditawar lagi mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, sementara kerusakan lingkungan sudah semakin meluas. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah memulai upaya pengurangan penggunaan plastik di sekitar perkantoran serta pusat perbelanjaan. Di kantor sudah tidak diperkenankan lagi adanya air minum kemasan. Pegawai diminta membawa botol minuman atau *tumbler* dari rumah masing-masing. Demikian juga di pusat-pusat perbelanjaan, tidak ada lagi kantong plastik yang digunakan untuk membungkus belanjaan. Semua menggunakan tas ramah lingkungan. Ini sudah merupakan awal yang baik, walau untuk mewujudkan kota cerdas harus diikuti hal-hal yang lebih prinsip, seperti penggunaan energi ramah lingkungan, mengingat sumber energi mulai terbatas, sedangkan polusi semakin tinggi.

Pemerintah harus tegas menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar konsep ramah lingkungan ini. *Reward and punishment* harus ditegakkan secara adil dan

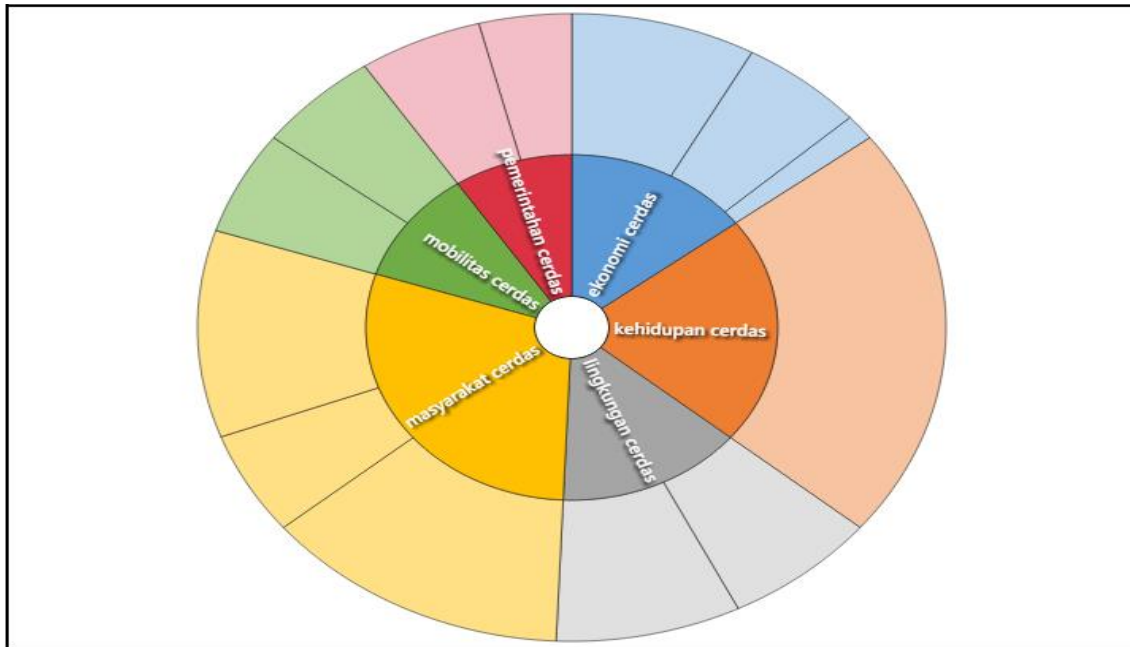


konsisten. Tidak hanya sanksi yang harus ditegakkan, tetapi penghargaan bagi pihak-pihak pejuang lingkungan yang senantiasa mengkampanyekan pemakaian sumber daya ramah lingkungan perlu diberikan sebagai apresiasi dari pemerintah kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sub dimensi dianggap sama pentingnya untuk diimplementasikan dalam rangka mewujudkan lingkungan cerdas di Kota Banjarmasin.

Masyarakat cerdas akan segera terwujud di Kota Banjarmasin jika ketiga prasyarat berikut terpenuhi: 1) pendidikan serba *online*; 2) masyarakat yang terbuka; serta 3) masyarakat yang kritis dan berbudaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang kritis dan berbudaya dianggap faktor yang paling menentukan terwujudnya masyarakat cerdas di Kota Banjarmasin. Kritis artinya masyarakat yang mempunyai kepekaan terhadap masalah dan sigap untuk mencari solusinya. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa kritis saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat. Artinya, masyarakat yang menjadi cikal bakal masyarakat cerdas adalah insan paripurna, manusia yang tidak hanya pintar tapi sangat memahami budaya yang sesuai untuk dikembangkan di Kota Banjarmasin.

Sub dimensi terakhir dari kota cerdas adalah mobilitas cerdas. Saat ini mobilitas cerdas belum terlalu terasa kebutuhannya di Kota Banjarmasin karena masih relatif kecil dan belum sepadat kota-kota metropolitan yang ada di Pulau Jawa. Walaupun demikian moda transportasi *online* sudah mulai masuk, yaitu *gojek*, dengan berbagai aplikasi pendukungnya, seperti *gocar* (transportasi roda empat) serta *gofood* (pemesanan makanan dan minuman). Transportasi *online* di Kota Banjarmasin sudah marak pemakaiannya dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk mewujudkan kota cerdas ada dua faktor yang dianggap penting walau pun saat ini belum terlalu populer di Kota Banjarmasin, yaitu moda transportasi campuran serta dukungan infrastruktur fisik dan internet yang memadai. Kedua indikator ini dianggap sama pentingnya dan tidak dipisahkan satu sama lain. Moda transportasi campuran harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur fisik dengan dukungan internet yang memadai. Apalagi mengingat Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai kota seribu sungai, tentu saja dapat menghidupkan kembali transportasi sungai untuk mobilitas atau pun untuk berwisata. Pergantian moda, kemudahan pembayaran, pemilihan rute, serta kemudahan pesan, serta pembatalan sangat membutuhkan dukungan internet yang memadai.

Akhirnya, dari keenam dimensi kota cerdas yang sudah dijabarkan di atas, selanjutnya dapat dipetakan dimensi yang dianggap paling penting dalam mewujudkan kota cerdas di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi masyarakat cerdas merupakan dimensi paling penting dan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam rangka mewujudkan kota cerdas. Gambar berikut memperlihatkan kontribusi masing-masing dimensi terhadap perwujudan kota cerdas di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini sangatlah logis mengingat manusia sebagai subjek pembangunan haruslah memiliki cara berpikir yang kritis tanpa menafikkan nilai-nilai budaya di dalamnya. Kota cerdas tanpa mengindahkan nilai-nilai budaya di dalamnya, tidak akan terasa manfaatnya oleh masyarakat sekitar.



Gambar 8 Faktor-Faktor yang Dapat Mempercepat Terbentuknya Banjarmasin Kota Cerdas

## KESIMPULAN

Dari analisis yang cukup komprehensif, diperoleh kesimpulan bahwa kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin menuju kota cerdas termasuk dalam kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama). Ini bukan kondisi ideal atau terbaik, tetapi paling tidak menjadi acuan untuk menuju kota cerdas yang sesuai diterapkan di Kota Banjarmasin. Untuk menuju kondisi ideal yaitu siap dan terdepan dalam persaingan (paripurna) dibutuhkan keseriusan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyiapkan berbagai hal yang dapat mempercepat terwujudnya Banjarmasin Kota Cerdas. Faktor-faktor yang dapat mempercepat terwujudnya Banjarmasin Kota Cerdas adalah: pusat data yang terintegrasi, iklim usaha yang kondusif, kesehatan, perencanaan kota yang ramah lingkungan, penerapan *reward and punishment* yang adil dan konsisten, masyarakat yang kritis dan berbudaya, moda transportasi campuran, serta infrastruktur fisik dan internet yang memadai. Sementara itu dimensi masyarakat cerdas mempunyai kontribusi paling besar untuk mewujudkan Banjarmasin Kota Cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri. (2016). Komunikasi Dalam Menunjang Terwujudnya Makassar Sebagai “ Smart City.” *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(2), 431–445.
- Apa Itu Smart City dan Tantangan Penerapannya di Indonesia.* (n.d.). <https://id.techinasia.com/apa-itu-smart-city-dan-penerapan-di-indonesia>
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). *KESIAPAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH MENUJU PENGEMBANGAN SMART PROVINCE ( STUDI PADA PEMERINTAH*

*KABUPATEN MANDAILING NATAL , PROVINSI SUMATERA UTARA ) E-GOVERNMENT READINESS ON LOCAL GOVERNMENT TOWARDS DEVELOPMENT OF SMART PROVINCE ( STUDY ON MANDAILIN. 185–196.*

- Firto Nento, Lukito Edi Nugroho, S. (2017). Model e-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2017 ITN Malang*, 1–7.
- Hilal, A. H., & Alabri, S. S. (2013). Using NVIVO for Data Analysis in Qualitative Research. *International Interdisciplinary Journal Education*, 2(2), 181–186.
- jejakrekam.com, 17 Februari, *Program Smart City Banjarmasin Beroperasi*. (n.d.). <http://jejakrekam.com/2018/01/02/17-februari-program-smart-city-banjarmasin-beroperasi/>
- Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 248/PER/DJPPI/KOMINFO/10/2011 tentang Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura, 1 (2011).
- Kesulitan Kota Banjarmasin Mewujudkan Smart City*. (n.d.). <https://kumparan.com/banjarhits/kesulitan-kota-banjarmasin-mewujudkan-smart-city-27431110790536720>
- Launching Banjarmasin Smart City, 11 Aplikasi Terintegrasi di Command Centre*. (n.d.). <https://www.kanalkalimantan.com/launching-banjarmasin-smart-city-11-aplikasi-terintegrasi-di-command-centre/>
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawati, T. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 6(1), 412–417.
- Mujiyono, Angkasa, M. P., & Rismawati, S. D. (2016). Kesiapan Kota Pekalongan Menuju Smart City. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 11, 107–116.
- Perencanaan, B., Nasional, P., Kementrian Perencanaan, B., & Nasional, P. (2015). Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia. *Konferensi E-Indonesia Initiative (EII) Dan Smart Indonesia Initiatives (SII) Forum Ke-1*. <https://doi.org/10.1007/s10903-014-9994-x>
- Portal Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Kota Banjarmasin*. (2019). *Smart City Banjarmasin Resmi Diluncurkan, Begini Penampakannya*. (n.d.). <http://kalsel.prokal.co/read/news/13900-smart-city-banjarmasin-resmi-diluncurkan-begini-penampakannya.html>
- Suhendra, A., & Ginting, A. H. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan. *Matra Pembaruan*, 2(3), 185–195. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.185-195>
- Tampubolon, L. P. D. (2016). *Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi) Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Dki Jakarta*. 8(2), 1121–1132.